BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56.A/KPTS/ 1 / 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPB dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Tahun 2016 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan dimaksud;

b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPB dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Tahun 2016 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan ABPB dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Tahun 2016 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kab. Halmahera Barat;
14. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Ranperbup tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan ABPD Tahun 2016 Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pada Pos Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
4. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56.A /KPTS/1 /2017
TANGGAL 12 Januari 2017

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANPERBUP TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN 2016 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

No.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARAN HONOR
1	*2*	*3*	*4*
1	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	2.500.000
2	Wakil Bupati Halmahera Barat	Pengarah	2.500.000
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab	2.250.000
4	Ass Bid, Pemb, Kesra & Eko	Koordinator	2.000.000
5	Ass, Bid. Pem & Adm Umum	Wakil Koordinator	1.950.000
6	Kepala BPKD Kab. Halbar	Ketua	1.800.000
7	Anzar Abdurahman, SE	Sekretaris	1.750.000
8	Deny G. Kasim, SH, M.Hum	Anggota	1.500.000
9	Muhammad Marasabessy, SE	Anggota	1.500.000
10	Muhammad Mathar, SE, M.Si	Anggota	1.500.000
11	M. Arsil Says, S.Sos	Anggota	1.500.000
12	Debbie V. Sanggelorang, S.Sos	Anggota	1.500.000
13	Glen Lampah, SE	Anggota	1.500.000
14	La Ode Hambali	Anggota	1.500.000
15	Ahmad Thalib	Anggota	1.500.000
16	M. Ari Faldi, SE	Anggota	1.500.000
17	Hasanuddin Syamsuddin, S.Kom	Anggota	1.500.000
18	Jason K. Lalomo, SH, LL.M	Anggota	1.500.000
19	Sahrudin Hamid, SE	Anggota	1.500.000
20	Sukarni J. Hamid, SE	Anggota	1.500.000
21	Novita Yabarmase	Anggota	1.500.000
22	Hikma Roslita Kiat	Anggota	1.500.000
23	Rahmatia Rais	Anggota	1.500.000
25	Arnike Saban	Anggota	1.500.000
25	Yusni Labuha, SE	Anggota	1.500.000
26	Rosliati Ali, Amd	Anggota	1.500.000
27	Yusni H. Hans Reke	Anggota	1.500.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kepala BPKD	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY